



**BAB 1**  
**PENGANTAR PEMBANGUNAN**  
**DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**



## 1.1 Definisi Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Definisi ini tidak sekadar mencakup peningkatan produksi komoditas pertanian, tetapi juga meliputi transformasi sektor pertanian menjadi lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Menurut Mosher (1966), pembangunan pertanian adalah bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup transformasi pedesaan secara keseluruhan. Pembangunan pertanian mencakup lima elemen pokok yaitu peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, perbaikan akses pasar, dan peningkatan kesejahteraan petani. Dalam konteks Indonesia, Mubyarto (2002) mendefinisikan pembangunan pertanian sebagai suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan kebebasan para petani untuk memilih kegiatan-kegiatan terbaiknya.

Pembangunan pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembangunan sektor lainnya karena sangat bergantung pada kondisi alam, bersifat biologis, melibatkan jutaan rumah tangga petani dengan skala usaha yang beragam, serta memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat kompleks. Esensi pembangunan pertanian terletak pada perubahan pola pikir dan perilaku petani dari subsisten menjadi komersial, dari tradisional menjadi modern, serta dari orientasi produksi semata menjadi berorientasi pasar dan nilai tambah. Pembangunan pertanian merupakan proses transformasi pertanian yang mencakup tiga aspek utama: transformasi agronomi, transformasi ekonomi pertanian, dan transformasi kelembagaan pedesaan. Transformasi ini memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sugiarto (2008) memperluas definisi pembangunan pertanian dengan menambahkan aspek ekologis, menekankan bahwa pembangunan pertanian harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pembangunan pertanian dalam pengertian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Lebih lanjut, Arifin (2013) menekankan pentingnya dimensi kelembagaan dalam pembangunan pertanian, yang mencakup

aturan main, norma, dan organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar pelaku dalam sistem pertanian. Pembangunan kelembagaan ini mencakup penguatan organisasi petani, reformasi birokrasi pertanian, pengembangan sistem inovasi pertanian, serta perbaikan mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal dalam rantai nilai pertanian.

Dalam perspektif global, Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan pembangunan pertanian sebagai proses perubahan sosial di pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk pedesaan dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Definisi ini menekankan bahwa pembangunan pertanian bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih luas. Sejalan dengan perspektif ini, Hayami dan Godo (2005) mengemukakan konsep "transformasi pertanian" sebagai bagian integral dari proses pembangunan ekonomi, yang melibatkan perubahan struktur ekonomi dari dominasi pertanian subsisten menuju sistem pertanian yang lebih komersial dan terintegrasi dengan sektor industri dan jasa.

## **1.2 Sejarah Singkat Pembangunan Pertanian Global**

Sejarah pembangunan pertanian global telah mengalami evolusi yang panjang sejak manusia mulai bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan pertanian global dapat dilihat dalam beberapa fase penting yang menandai transformasi sektor ini dari waktu ke waktu. Revolusi Pertanian Pertama terjadi sekitar abad ke-18 di Inggris dan Eropa Barat, ditandai dengan pengenalan sistem rotasi tanaman, penggunaan alat-alat mekanis, dan perubahan penguasaan lahan yang meningkatkan produktivitas secara signifikan. Fase ini merupakan landasan bagi revolusi industri, dimana surplus produksi pertanian memungkinkan terjadinya urbanisasi dan industrialisasi. Revolusi Pertanian Kedua berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, ditandai dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan pengembangan varietas unggul yang menghasilkan peningkatan produktivitas yang spektakuler.

Tahun 1960-an hingga 1980-an menjadi saksi perkembangan yang dikenal sebagai Revolusi Hijau, terutama di Asia dan Amerika Latin, yang ditandai dengan pengenalan benih unggul (terutama padi dan gandum) yang responsif terhadap pupuk, pengembangan sistem irigasi modern, dan penggunaan pestisida secara intensif. Dewan Pimpinan Revolusi

Hijau yang diprakarsai oleh Rockefeller Foundation dan Ford Foundation dengan tokoh seperti Norman Borlaug (peraih Nobel Perdamaian 1970) berhasil menggandakan produksi pangan di banyak negara berkembang dan menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Di Indonesia, Revolusi Hijau diimplementasikan melalui program BIMAS (Bimbingan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal) yang berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Meskipun Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi, namun mulai mendapat kritik karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesenjangan sosial, sehingga pada era 1990-an hingga 2000-an muncul pendekatan baru yang lebih memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Perkembangan Revolusi Hijau sendiri tidak terlepas dari konteks geopolitik Perang Dingin. Pemerintah Amerika Serikat mendukung program ini sebagai bagian dari strategi menangkal pengaruh komunisme di negara-negara berkembang, dengan asumsi bahwa peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani akan mengurangi kerentanan terhadap ideologi komunis. Perkins (1997) dalam bukunya "Geopolitics and the Green Revolution" menjelaskan bahwa transfer teknologi pertanian ke negara-negara Asia dan Amerika Latin pada masa itu juga didorong oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi negara-negara maju. Terlepas dari motif politiknya, Revolusi Hijau telah mengubah wajah pertanian global secara fundamental dan menciptakan ketergantungan pada varietas unggul, pupuk kimia, dan pestisida.

Dinamika Revolusi Hijau di berbagai negara tidak seragam. Studi yang dilakukan oleh Hazell (2009) menunjukkan bahwa keberhasilan Revolusi Hijau di Asia Timur dan Asia Tenggara didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif, investasi publik dalam penelitian dan infrastruktur, serta struktur agraria yang relatif merata. Sebaliknya, di banyak negara Afrika, adopsi teknologi Revolusi Hijau terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, lemahnya kebijakan pendukung, dan kondisi agroekologi yang lebih kompleks. Di Amerika Latin, manfaat Revolusi Hijau cenderung terkonsentrasi pada pertanian skala besar, sehingga kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan lebih terbatas dibandingkan dengan Asia.

Abad ke-21 ditandai dengan apa yang disebut sebagai Revolusi Pertanian Keempat, yang dicirikan oleh adopsi teknologi digital, bioteknologi, dan pendekatan sistem pertanian yang lebih holistik dan berkelanjutan. Paradigma pembangunan pertanian kontemporer

menekankan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan lingkungan secara simultan. Pengalaman sejarah pembangunan pertanian global menunjukkan bahwa transformasi sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan kelembagaan, kebijakan yang tepat, serta kapasitas adaptasi petani terhadap perubahan. Pelajaran penting dari sejarah ini adalah bahwa kebijakan pembangunan pertanian harus mempertimbangkan konteks lokal, aspek sosial-budaya masyarakat, serta keseimbangan antara tujuan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang.

Era pasca-Revolusi Hijau ditandai oleh pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman sistem pertanian dan jalur pembangunan. Pendekatan "one size fits all" yang menjadi ciri Revolusi Hijau mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih kontekstual dan beragam. IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) dalam laporannya tahun 2009 menekankan pentingnya pendekatan yang beragam dan kontekstual dalam pembangunan pertanian, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan ilmu pengetahuan formal. Laporan ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas petani kecil dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai strategi kunci dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

Perkembangan terakhir dalam pembangunan pertanian global juga ditandai oleh pergeseran dari fokus sempit pada peningkatan produksi menuju pendekatan sistem pangan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini mempertimbangkan seluruh rantai nilai dari produksi hingga konsumsi, serta keterkaitan antara sistem pangan dengan isu-isu kesehatan, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan perubahan iklim. Forum Tingkat Tinggi tentang Ketahanan Pangan Dunia tahun 2021 merekomendasikan transformasi sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sebagai strategi utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### **1.3 Peran Kebijakan dalam Pembangunan Pertanian**

Kebijakan pertanian memainkan peran strategis dalam mengarahkan, mempercepat, dan menjamin keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan yang tepat dapat mengatasi berbagai kegagalan pasar (market failures) yang umum terjadi di sektor pertanian, seperti eksternalitas, asimetri informasi, dan ketidaksempurnaan pasar.

Kebijakan pertanian berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Kebijakan yang tepat dapat mengatasi berbagai hambatan struktural yang dihadapi petani seperti akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, pasar, dan layanan keuangan. Kebijakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi dan pasar, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan yang mempengaruhi dinamika sektor pertanian secara keseluruhan.

Peran kebijakan dalam pembangunan pertanian dapat dianalisis dari berbagai perspektif teoretis. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, kebijakan pertanian berperan dalam mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian serta melindungi hak-hak kepemilikan, sehingga menciptakan insentif bagi investasi dan inovasi. North (1990) berargumen bahwa kelembagaan formal, termasuk kebijakan pemerintah, dapat mengurangi ketidakpastian dan membentuk struktur insentif dalam sektor pertanian. Kebijakan juga dapat berperan dalam mengoreksi berbagai eksternalitas negatif yang terkait dengan aktivitas pertanian, seperti polusi air akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

**Tabel 1.1.**  
**Evolusi Kebijakan Pertanian di Berbagai Negara**

| <b>Periode</b> | <b>Karakteristik Kebijakan</b>             | <b>Contoh Negara</b>               | <b>Fokus Utama</b>                                    |
|----------------|--|------------------------------------|---|
| 1950-1960an    | Kebijakan berorientasi produksi            | India, Meksiko, Indonesia          | Peningkatan produksi pangan, modernisasi teknologi    |
| 1970-1980an    | Kebijakan intervensi harga dan pasar       | Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang | Stabilisasi harga, perlindungan petani, swasembada    |
| 1990-2000an    | Kebijakan liberalisasi dan reformasi pasar | Negara-negara Asia, Amerika Latin  | Efisiensi pasar, pengurangan intervensi pemerintah    |
| 2000-sekarang  | Kebijakan multifungsi dan berkelanjutan    | Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan   | Lingkungan, kesejahteraan hewan, pembangunan pedesaan |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat adanya pergeseran orientasi kebijakan pertanian dari waktu ke waktu. Pada periode awal pembangunan, kebijakan pertanian lebih difokuskan pada peningkatan produksi pangan dan modernisasi teknologi pertanian. Seiring dengan

perkembangan zaman, terjadi perluasan fokus kebijakan yang mencakup aspek-aspek seperti stabilisasi harga, perlindungan produsen dan konsumen, hingga multifungsi pertanian yang meliputi jasa lingkungan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pertanian di Indonesia juga mengalami evolusi serupa, dari kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi beras pada era Orde Baru, hingga kebijakan yang lebih diversifikatif dan berorientasi pasar pada era reformasi.

Tabel 1.1 memberikan gambaran umum tentang evolusi kebijakan pertanian di berbagai negara dari waktu ke waktu. Perlu dicatat bahwa meskipun terdapat kecenderungan global tertentu dalam perkembangan kebijakan, setiap negara memiliki trajektori kebijakan yang unik yang dipengaruhi oleh konteks historis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya masing-masing. Di Indonesia, misalnya, pergeseran dari kebijakan yang berorientasi swasembada beras pada era Orde Baru menuju kebijakan yang lebih diversifikatif pada era reformasi dipengaruhi oleh perubahan politik, krisis ekonomi 1997-1998, serta tekanan dari lembaga-lembaga internasional.

Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan pertanian merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kelompok kepentingan. Anderson (2010) melalui studi komparatif kebijakan pertanian di berbagai negara menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pertanian sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok-kelompok elit. Di negara-negara maju, kebijakan pertanian cenderung proteksionis dan memberikan dukungan harga bagi petani domestik, sedangkan di banyak negara berkembang, terutama sebelum era 1990-an, kebijakan cenderung berpihak pada konsumen perkotaan (urban bias) dengan menekan harga produk pertanian. Reformasi kebijakan pertanian sering kali terhambat oleh resistensi kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan yang ada (status quo).

Efektivitas kebijakan pertanian sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks lokal, kapasitas implementasi, dan koherensi antar kebijakan. Kebijakan yang baik harus responsif terhadap kebutuhan petani, mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, serta menyelaraskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim, kebijakan pertanian perlu lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian. Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan yang berhasil umumnya ditandai oleh adanya

konsistensi, prediktabilitas, dan berlandaskan bukti ilmiah serta partisipasi masyarakat.

#### **1.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pertanian Masa Kini**

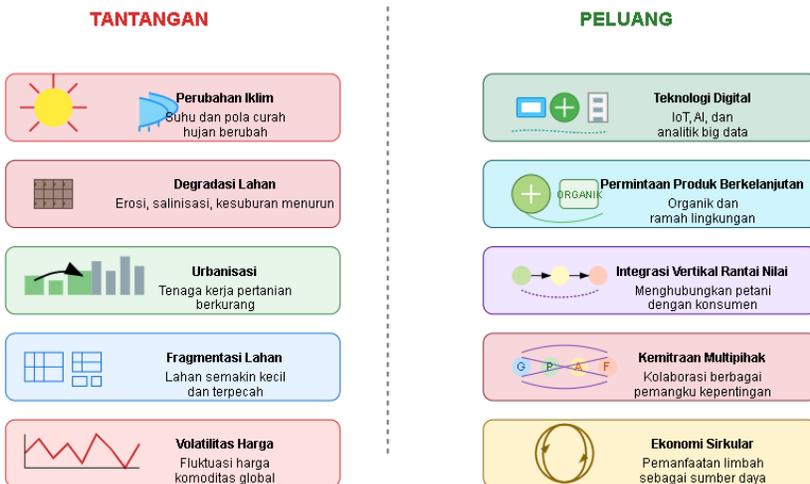
Pembangunan pertanian kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang yang kompleks dan multidimensi. Tantangan utama pembangunan pertanian saat ini meliputi perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari pedesaan, fragmentasi lahan, ketimpangan penguasaan sumber daya, serta volatilitas harga komoditas pertanian di pasar global. Perubahan iklim secara khusus memberikan tekanan signifikan terhadap aktivitas pertanian melalui peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama penyakit. Fenomena urbanisasi dan penuaan petani mengakibatkan masalah ketenagakerjaan dan regenerasi di sektor pertanian, dimana minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang. Sementara itu, perkembangan perdagangan global dan integrasi pasar komoditas pertanian, meskipun membuka peluang pasar baru, juga menciptakan kompetisi yang semakin ketat bagi produk pertanian domestik.

Studi yang dilakukan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi produktivitas pertanian global hingga 17% pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan adaptasi yang memadai. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian bersifat tidak merata secara geografis, dengan negara-negara di daerah tropis dan subtropis umumnya mengalami dampak negatif yang lebih besar dibandingkan negara-negara di daerah beriklim sedang. Di Indonesia, perubahan pola curah hujan dan suhu telah menyebabkan pergeseran kalender tanam, peningkatan frekuensi kekeringan dan banjir, serta peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman. Studi yang dilakukan oleh Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (2018) memperkirakan penurunan produksi padi di Jawa sebesar 1-2% per tahun akibat perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya adaptasi yang memadai.

Tantangan lain yang dihadapi pembangunan pertanian adalah degradasi sumber daya alam, termasuk penurunan kesuburan tanah, erosi, salinisasi, dan pencemaran air. Menurut FAO (2015), sekitar 33% lahan pertanian di dunia mengalami degradasi sedang hingga parah. Konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian, terutama di

kawasan periurban, juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pertanian. Di Indonesia, laju konversi lahan sawah mencapai 100.000 hektar per tahun, sementara kemampuan pencetakan sawah baru hanya sekitar 40.000 hektar per tahun. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional dalam jangka panjang.

Namun demikian, berbagai tantangan tersebut juga membuka peluang inovasi dan transformasi sektor pertanian. Perkembangan teknologi digital dan komunikasi menawarkan solusi baru bagi efisiensi produksi, pengelolaan rantai pasok, dan akses pasar bagi petani. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, dan big data analytic mampu meningkatkan presisi dalam praktik pertanian serta meminimalkan risiko produksi. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan juga membuka peluang pasar baru untuk produk-produk pertanian organik, ramah lingkungan, dan bernilai tambah tinggi. Meningkatnya permintaan terhadap pangan yang sehat dan berkelanjutan menciptakan segmen pasar premium yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan petani.



**Gambar 1.1**  
**Tantangan dan Peluang Pembangunan Pertanian Kontemporer**

Gambar 1.1 mengilustrasikan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi pembangunan pertanian kontemporer. Di sisi kiri, terdapat lima tantangan utama: perubahan iklim, degradasi lahan, urbanisasi, fragmentasi lahan, dan volatilitas harga. Perubahan iklim ditunjukkan dengan simbol termometer dan awan hujan, menandakan perubahan suhu dan pola curah hujan yang berdampak pada produksi pertanian. Degradasi lahan diilustrasikan dengan gambar tanah yang retak dan tandus, menggambarkan masalah erosi, salinisasi, dan penurunan kesuburan tanah. Urbanisasi digambarkan dengan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja pertanian di pedesaan. Fragmentasi lahan ditunjukkan dengan peta persil lahan yang semakin kecil dan terpecah, akibat sistem warisan dan tekanan demografis. Volatilitas harga diilustrasikan dengan grafik harga komoditas yang fluktuatif, mencerminkan ketidakstabilan pasar komoditas pertanian global.

Di sisi kanan gambar, terdapat berbagai peluang bagi pembangunan pertanian. Teknologi digital direpresentasikan dengan perangkat elektronik, sensor, dan jaringan komputer yang dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam praktik pertanian. Permintaan produk berkelanjutan ditunjukkan dengan konsumen yang memilih produk dengan label ramah lingkungan dan organik, mencerminkan tren pasar yang menguntungkan bagi pertanian berkelanjutan. Integrasi vertikal rantai nilai diilustrasikan dengan diagram yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau industri pengolahan, mengurangi peran perantara. Kemitraan multipihak digambarkan dengan representasi berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, peneliti, petani) yang bekerja sama dalam jejaring kolaboratif.

Transformasi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kompleksitas dan keterkaitan antar berbagai aspek sistem pangan dan pertanian. Pendekatan landscape atau bentang lahan, yang memadukan pengelolaan lahan, air, dan sumber daya biologis dalam skala ekosistem, menjadi semakin relevan untuk menjawab tantangan keberlanjutan. Kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga penelitian juga semakin penting dalam mendorong inovasi dan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan pertanian. Model-model bisnis inklusif yang menghubungkan petani kecil dengan pasar bernilai tinggi, seperti pertanian kontrak dan sistem jaminan partisipatif, menawarkan alternatif baru untuk meningkatkan posisi tawar dan pendapatan petani.

Perkembangan konsep ekonomi sirkular (circular economy) dalam konteks pertanian juga menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan kembali limbah pertanian sebagai input produksi, baik dalam bentuk pupuk organik, pakan ternak, maupun sumber energi. Pengembangan bioenergi dari biomassa pertanian, misalnya, tidak hanya membuka sumber pendapatan baru bagi petani tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui substitusi bahan bakar fosil.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, dibutuhkan kebijakan pertanian yang adaptif, berbasis bukti, dan responsif terhadap dinamika global maupun lokal. Kebijakan yang efektif tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek ketahanan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Pendekatan sistem pangan (food system approach) yang mempertimbangkan keterkaitan antar komponen dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan semakin penting untuk diterapkan dalam kebijakan pertanian kontemporer.

## **1.5 Tujuan dan Ruang Lingkup Buku**

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teori, dan praktik pembangunan dan kebijakan pertanian secara integratif. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sumber referensi yang mengkaji pembangunan pertanian tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas tantangan pembangunan pertanian kontemporer serta peran strategis kebijakan dalam mengatasi tantangan tersebut. Buku ini juga bertujuan untuk menstimulasi pemikiran kritis dan inovatif dalam merancang solusi-solusi baru bagi permasalahan pembangunan pertanian, khususnya dalam konteks Indonesia.

Secara spesifik, tujuan penulisan buku ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis berbagai konsep dan teori pembangunan pertanian yang relevan dengan konteks kontemporer; (2) menjelaskan kerangka analisis kebijakan pertanian sebagai landasan untuk memahami proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan; (3) mengkaji berbagai dimensi kebijakan pertanian secara

komprehensif, mulai dari kebijakan harga dan pasar hingga kebijakan pertanian era digital; (4) menganalisis berbagai pengalaman empiris dalam implementasi kebijakan pertanian, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain; dan (5) merumuskan arah dan strategi pembangunan pertanian masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup buku ini meliputi berbagai aspek pembangunan dan kebijakan pertanian, mulai dari landasan teoritis hingga isu-isu kontemporer. Bab 1 memberikan pengantar tentang konsep dasar pembangunan pertanian dan peran kebijakan. Bab 2 mengkaji berbagai teori pembangunan pertanian yang berkembang dari masa ke masa. Bab 3 membahas kerangka analisis kebijakan pertanian sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya. Bab 4 hingga Bab 13 mengeksplorasi berbagai dimensi kebijakan pertanian secara lebih spesifik, meliputi kebijakan harga dan pasar, kebijakan lahan, kebijakan teknologi dan penyuluhan, kebijakan investasi, kebijakan infrastruktur, kebijakan rantai nilai, kebijakan ketahanan pangan, kebijakan pertanian berkelanjutan, kebijakan pemberdayaan petani, serta kebijakan pertanian era digital. Buku ditutup dengan Bab 14 yang menyajikan refleksi tentang masa depan pembangunan dan kebijakan pertanian.

Struktur buku dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan logis antar topik. Bab-bab awal menyajikan konsep dan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Setiap bab membahas aspek spesifik dari kebijakan pertanian secara mendalam, dilengkapi dengan contoh empiris, studi kasus, dan analisis kritis. Penekanan diberikan pada konteks Indonesia, namun dengan menempatkannya dalam kerangka global dan komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat multidisiplin, memadukan perspektif ekonomi, sosiologi, antropologi, ekologi, dan studi pembangunan. Materi dalam buku ini disajikan secara berimbang antara pembahasan teoritis dan contoh-contoh empiris, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia namun tetap menempatkannya dalam perspektif global.

Buku ini dirancang sebagai sumber referensi bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam bidang pertanian, ekonomi, dan studi pembangunan; para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah; praktisi pembangunan pertanian; akademisi dan peneliti; serta masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu pembangunan pertanian dan kebijakan pangan. Untuk

mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi utama dalam mata kuliah terkait ekonomi pertanian, pembangunan pertanian, dan analisis kebijakan pertanian. Bagi pengambil kebijakan, buku ini menawarkan kerangka analisis dan pembelajaran dari berbagai pengalaman dalam merumuskan kebijakan pertanian yang efektif. Bagi praktisi pembangunan, buku ini menyediakan perspektif teoretis yang dapat memperkaya pendekatan praktis dalam pembangunan pertanian.

Penulisan buku ini juga didasarkan pada kajian literatur mutakhir serta pengalaman praktis yang relevan dengan tantangan pembangunan pertanian saat ini. Untuk memudahkan pemahaman, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, kotak informasi, dan studi kasus yang kontekstual dengan realitas pembangunan pertanian Indonesia. Pendekatan pedagogis yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dimana pembaca diajak untuk menganalisis berbagai permasalahan nyata dalam pembangunan pertanian dan mengeksplorasi alternatif solusinya. Penyajian materi diupayakan seimbang antara aspek konseptual dan aplikatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembaca dengan latar belakang dan minat yang beragam.

Keunikan buku ini terletak pada integrasinya yang komprehensif antara konsep pembangunan pertanian dan kebijakan pertanian. Kebanyakan literatur yang ada cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, sehingga kurang mampu menggambarkan keterkaitan dinamis di antara keduanya. Buku ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis terintegrasi tentang bagaimana pembangunan pertanian dipengaruhi oleh kebijakan, dan sebaliknya, bagaimana dinamika pembangunan pertanian membentuk evolusi kebijakan. Keunikan lainnya adalah penekanan pada konteks Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya, namun tetap diletakkan dalam kerangka komparatif global, sehingga dapat memperkaya perspektif analisis dan pembelajaran dari pengalaman berbagai negara.

Melalui buku ini, diharapkan terjadi penguatan kapasitas berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus akademik dan praktis tentang transformasi sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, khususnya perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi.

